

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Ahmad Nadir, 2005, *Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Malang
- Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2006, *Pemilukada Langsung Problem dan Prospek Sketsa Singkat Perjalanan Pemilukada 2005*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Anthony Allot, "The Effectiveness of Law," Valpariso University Law Review, Vol. 15 (No. 2 Winter 1981), hal. 235-237, dalam T. Keizerina Devi, Poenale Sanctie: *Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)* (Jakarta : Fakultas ukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2004)
- Donni Edwin. dkk, 2005, *Pemilukada Langsung : Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*, Jakarta, Partnership
- Fatkhurohman dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*, New York: Russels & Russels
- Hendarmin Ranadireksa, 2007, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung
- J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Pembangunan Ghalia Indonesia
- Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kuntjoroningrat, 1993, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Ikrar Mandiri Alam, Jakarta
- Leo Agustino, 2009, *Pemilukada Dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Materi Konferensi Pers Bawaslu Ri Divisi Hukum Dan Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Kada 2010 Rabu, 22 Desember 2010
- Miriam Budiarto, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta
- Morissan, 2005, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakasa, Jakarta

Noeng Muhadjir, 2003, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*, Rake Sarasin, Yogyakarta

Prihatmoko, Joko J. 2005, *Pemilihan Kepala daerah langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Soerjoko Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Syaukani, ad all, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Teuku Amir Hamzah, dkk, 1963, *Ilmu Negara*, Pt Gramedia

Thomas Meyer, 2003, *Sosial-Demokrasi dalam Teori dan Praktik*, CSDS, Yogyakarta

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitain Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

#### **Internet**

Aman Toto Dwijono, tt, *Sosialisasi Politik Menjelang Pemilihan Gubernurpropinsi Lampung Secara Langsung Tahun 2008*, dari : <http://blog.unila.ac.id/amantoto/pengabdian-masy/>

<http://indo.fm/391374>, dengan judul [Pemilukada Ulang Pati- Kalah, Tim Mbah Roso Gugat ke MK](#)

[Konflik Dalam Pemilukada Anatomi Konflik Dalam Pemilukada](#), 27 April 2010, <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/konflik-dalam-Pemilukada.html>

[Membangun dan Mengawasi Politik Lokal dalam PEMILUKADA](#), 1 februari 2008, <http://budakpulau.wordpress.com/2008/02/01/membangun-dan-mengawasi-politik-lokal-dalam-Pemilukada/>

[www.berita8.com/read/2012/04/16/1/54664/Pemilukada-Ulang-Pati-Digelar-16-Juni](http://www.berita8.com/read/2012/04/16/1/54664/Pemilukada-Ulang-Pati-Digelar-16-Juni), Pemilukada Ulang Pati Digelar 16 Juni

[www.republikaonline.com](http://www.republikaonline.com), dengan judul KPU Pati Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang, Jumat, 18 Mei 2012

[www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) dengan judul Forum Demokrasi Pati Tolak Pemilukada Ulang, Jumat, 20 Juli 2012

**Koran**

Moh Ma'ruf, *Optimisme Pemilukada Langsung*, Kompas, 22 Februari 2005

**Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang dirubah dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 terkait masalah pengulangan Pemilukada

